

Kemiskinan dan Pemberdayaan Usaha Kecil di Tengah Tantangan Perubahan Ekonomi dan Politik Indonesia

Ignatius Ismanto
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pelita Harapan
Karawaci-Tangerang, Banten

ignatius.ismanto@uph.edu

Abstrak

Indonesia merupakan salah satu negara anggota PBB yang ikut menanda-tangani *Millennium Development Goals* (MDGs) pada 2000, yang salah satu pilarnya adalah memerangi kemiskinan. Kemiskinan tentu bukanlah isu yang baru bagi Indonesia. Berbagai kebijakan dan program telah diperkenalkan untuk mengatasi masalah kemiskinan. Salah satu isu yang menarik dari kebijakan untuk memerangi kemiskinan itu adalah pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Pemberdayaan usaha kecil dapat dipandang sebagai kebijakan yang strategis dalam memutuskan mata rantai kemiskinan di Indonesia. Pemberdayaan UKM diharapkan tidak hanya memperluas lapangan kerja tetapi juga memperkuat struktur ekonomi nasional, yang pada akhirnya sangat berarti dalam mengatasi kemiskinan.

Kata kunci: rent-seeking activities, transparansi kebijakan

Kemiskinan merupakan tantangan serius bagi Indonesia di tengah perubahan ekonomi dan politik yang dihadapinya dewasa ini. Krisis ekonomi yang menghantam Indonesia pada 1997 tidak saja memicu peningkatan jumlah pengangguran, tetapi juga mendorong peningkatan jumlah kemiskinan yang tajam. Berbagai program telah ditempuh Indonesia dalam mengatasi kemiskinan itu, seperti: penancangan proyek-proyek padat karya, bantuan keuangan langsung kepada keluarga miskin, bantuan pendidikan dan kesehatan bagi keluarga miskin, serta program-program sosial lainnya. Indonesia bersama dengan negara-negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) juga telah ikut menanda-tangani Deklarasi Milenium pada 2000 sebagai bagian dari komitmennya dalam memerangi kemiskinan.

Kemiskinan merupakan isu yang bersifat multi-dimensi. Berbagai pendekatan dan program diperlukan untuk mengatasi kemiskinan. Salah satu pendekatan dan program yang difokuskan dalam tulisan ini adalah pemberdayaan usaha kecil¹. Pemberdayaan usaha kecil merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kebijakan dan program pengentasan kemiskinan

¹ Istilah usaha kecil yang digunakan dalam tulisan ini mencakup jenis kegiatan usaha yang sering disebut usaha kecil dan menengah (UKM).

lainnya. Ada sejumlah pertimbangan mengapa usaha kecil itu dipandang memainkan peran strategis dalam menurunkan kemiskinan di Indonesia, yaitu kegiatan usaha kecil memiliki potensi yang besar dalam membuka lapangan kerja yang luas, serta menjadi instrumen bagi peningkatan dan pemerataan pendapatan. Pemberdayaan usaha kecil memang bukan isu yang baru. Tulisan ini menfokuskan kajian pada tantangan pemberdayaan usaha kecil di tengah perubahan ekonomi dan politik Indonesia.

Akumulasi Kapital dan Marginalisasi Ekonomi

Indonesia pernah mengalami pertumbuhan ekonomi yang menakjubkan selama periode awal 1970-an hingga pertengahan 1990-an. Selama periode itu, Indonesia menikmati pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, yaitu rata-rata 5-6 persen per tahun. Pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi itu dapat dipertahankan dalam kurun waktu yang relatif panjang dan tanpa mengalami gangguan yang cukup berarti². Bank Dunia (1993) menempatkan Indonesia, bersama sejumlah negara di kawasan Asia Timur yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, dengan sebutan keajaiban ekonomi³ Asia Timur (*East Asia's economic miracle*). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga diikuti oleh transformasi struktur ekonomi Indonesia, yaitu dari struktur ekonomi agraris menuju struktur ekonomi yang semakin dicirikan oleh meningkatnya peran sektor industri manufaktur. Bahkan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan itu juga telah memungkinkan proses akumulasi kapital yang luar biasa menjelang awal 1980-an. Lahirnya sejumlah perusahaan skala besar, baik swasta maupun BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dimungkinkan oleh peran dan intervensi pemerintah seiring dengan kebijakan industrialisasi yang protektif. Krisis ekonomi yang menghantam Indonesia pada 1997 mengakhiri masa keemasan itu. Bahkan, krisis ekonomi itu membawa dampak sosial yang luas, yaitu meningkatnya pengangguran dan memburuknya kemiskinan. Sub-bab ini mengkaji siapa yang terbuai dan siapa yang terabaikan dari proses pembangunan ekonomi itu.

Ideologi pembangunan ekonomi seringkali memberikan legitimasi terhadap pentingnya peran dan intervensi negara dalam ekonomi. Bahkan bagi negara-negara Dunia Ketiga yang dihadapkan pada keterlambatan industrialisasi (*late industrialization*), peran negara dipandang menjadi faktor yang sangat diperlukan untuk mengejar (*catching-up*) keterlambatan industrialisasinya. Ideologi pembangunan ekonomi itu pulalah yang mendorong kalangan

² Kecuali pada pertengahan 1980-an, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan selama beberapa tahun.

³ Keajaiban ekonomi yang digunakan oleh Bank Dunia itu dimaksudkan tidak sekedar menggambarkan fenomena pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan semata. Tetapi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan dapat dipertahankan selama kurun waktu yang panjang itu juga diikuti oleh membaiknya kesenjangan social-ekonomi masyarakat.

pemimpin Dunia Ketiga dalam merumuskan kebijakan industrialisasi arahan negara. Sentimen itu-pun sangat kuat di kalangan elit politik nasional sejak Indonesia merdeka. Kebijakan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia pada pertengahan 1950-an menjadi bagian penting dari kebijakan industrilisasi arahan negara yang ditempuh pemerintah pada masa 1950-an hingga 1960-an. Namun, kesulitan pendanaan selalu menjadi kendala serius dalam membiayai industrialisasi arahan negara itu. Kebangkitan kembali sentimen industrialisasi arahan negara itu memperoleh momentum seiring dengan meningkatnya kemampuan finansial negara, yaitu seiring dengan meningkatnya penerimaan negara dari rezeki minyak pada awal 1970-an.

Meningkatnya kemampuan finansial negara telah memungkinkan negara mengalokasikan dana yang besar untuk membiayai program-program pembangunan. Melalui kebijakan moneter, bank-bank pemerintah tidak saja menjalankan 'fungsi intermediasi' tetapi juga menjalankan 'fungsi pembangunan', yaitu menyalurkan kredit untuk membiayai industri yang dianggap strategis, serta program-program pemerataan pembangunan. Demikian pula, melalui kebijakan anggaran, pemerintah berperan sebagai penyerap pasar terbesar untuk barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri. Kebijakan industrialisasi arahan negara juga telah memungkinkan pemerintah menyalurkan subsidi, lisensi, atau monopoli serta berbagai kebijakan proteksi lainnya. Lahirnya sejumlah kalangan perusahaan besar tak lepas dari monopoli atau-pun lisensi yang disalurkan oleh negara yang diberikan kepada mereka karena pertimbangan untuk melindungi industri yang baru berkembang (*infant industries*). Lahirnya perusahaan besar itu karenanya tak lepas dari *rent-seeking activities*, yaitu proteksi yang diberikan oleh negara. Apa yang mendorong pemerintah dalam mendorong tumbuhnya perusahaan besar itu? Mereka itu diharapkan tidak saja untuk memperkuat ekonomi nasional tetapi juga diharapkan menjadi pelaku ekonomi yang tangguh, terutama dalam menghadapi persaingan global.

Di samping perusahaan besar, juga ada perusahaan yang dikelompokkan sebagai perusahaan kecil yang jumlahnya sangat banyak. Berapa persis jumlah mereka ini sangat sulit dipastikan karena definisi tentang usaha kecil itu-pun sangat beragam. Keberadaan mereka sangat jauh berbeda dengan perusahaan besar. Bila perusahaan besar memperoleh perlakuan yang khusus dari pemerintah. Sebaliknya, kelangsungan perusahaan kecil dihadapkan pada ketidakpastian usaha. Regulasi pemerintah yang mengatur aktivitas ekonomi-pun seringkali membatasi peluang ataupun mematikan potensi bagi kelangsungan usaha kecil. Kelangsungan usaha kecil sering kali dipertentangkan dengan keberadaan perusahaan besar. Isu kesenjangan sosial yang menyertai pertumbuhan ekonomi sering dikaitkan antara kejayaan bagi usaha besar dan kematian bagi usaha kecil. Pemerintah mencanangkan program-program bantuan bagi usaha kecil hanya

sekedar untuk meredam isu kesenjangan sosial itu, dan sesungguhnya tidak dimaksudkan untuk memecahkan akar permasalahan yang substansial yang dihadapi usaha kecil. Program-program bantuan ekonomi bagi usaha kecil hanya menjadi instrumen untuk mewujudkan stabilitas sosial dan politik. Pemerintah sangat berkepentingan untuk menjaga stabilitas sosial-politik itu. Stabilitas sosial-politik menjadi syarat bagi pembangunan ekonomi, yang memungkinkan bagi proses akumulasi kapital dan menjadi tujuan utama dari proses pembangunan itu.

Stabilitas sosial politik yang diwujudkan dalam sistem politik yang otoritarian-pun tak lepas dari intervensi negara. Negara tidak saja melakukan intervensi dalam kegiatan ekonomi, tetapi juga intervensi dalam kehidupan sosial-politik. Sistem inilah yang dikenal dengan korporatisme negara (*state corporatism*), dimana negara mengendalikan berbagai kepentingan yang berkembang dalam masyarakat. Bentuk-bentuk pengendalian itu dapat dilakukan melalui penundukan (*ko-optasi*) atau melalui paksaan (*coersive*). Pengendalian berbagai kepentingan bisnis yang bersaing umumnya ditempuh melalui cara-cara paksaan. Selama masa Orde Baru, pemerintah hanya mengakui satu organisasi yang dianggap sah mewakili kepentingan pengusaha, yaitu KADIN (Kamar Dagang Indonesia). Di luar KADIN, bila organisasi-organisasi usaha yang memperjuangkan kepentingan usaha, apalagi bila kepentingan mereka itu dianggap bertentangan atau dengan kepentingan pemerintah maka pemerintah dapat membubarkan organisasi-organisasi tersebut. Dalam sistem korporatisme negara, organisasi korporatis itu sesungguhnya lebih merupakan alat negara (pemerintah) daripada sarana bagi anggota untuk memperjuangkan kepentingan mereka. Kalangan usaha kecil semakin terbatas untuk memiliki akses dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kelangsungan hidupnya. Berbeda dengan perusahaan besar, kalangan pengusaha besar ini umumnya memiliki koneksi politik dengan elit kekuasaan. Koneksi politik inilah yang memungkinkan mereka memperoleh konsesi, lisensi, atau-pun proteksi ekonomi lainnya dari kalangan elit kekuasaan. Hubungan antara mereka (pengusaha besar) dan penguasa umumnya bersifat 'mutualistik-simbiosis', yaitu saling menguntungkan keduanya.

Elemen masyarakat lainnya yang mengalami marginalisasi ekonomi adalah rakyat jelata yang umumnya menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian. Mereka umumnya tinggal di pedesaan atau berada di wilayah terpencil. Mereka ini umumnya tak berpendidikan dan merupakan petani gurem atau buruh tanah. Bahkan, tradisi yang diskriminatif dan bias gender yang melemahkan peran wanita dalam kegiatan ekonomi sering sekali menjadi beban yang wanita dalam situasi ekonomi yang sulit. Kebijakan pemerintah yang menekankan pada swasembada beras dengan ditopang oleh pengendalian harga beras memang menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan stabilitas sosial. Namun, kebijakan itu acapkali juga mengabaikan

kepentingan mereka yang menggantungkan hidup mereka dari sektor pertanian. Liberalisasi ekonomi memungkinkan penyesuaian (baca: kenaikan) terhadap harga barang dan jasa. Sebaliknya, pengendalian terhadap harga beras yang sarat dengan muatan politik, yaitu demi stabilitas sosial – sangat berpotensi menurunkan margin keuntungan petani. Berbagai program-program kemiskinan juga telah dicanangkan untuk menurunkan kemiskinan. Namun, implementasi program-program kemiskinan itu seringkali dihadapkan pada sejumlah kendala birokrasi. Bahkan tidak menutup kemungkinan, program-program anti kemiskinan itu hanya sekedar instrumen untuk kepentingan mobilisasi dukungan politik pemerintah.

Indonesia di Tengah Tantangan Ekonomi yang Telah Berubah

Krisis ekonomi 1997 yang awalnya dipicu oleh krisis moneter telah membawa dampak yang luas bagi perubahan ekonomi dan politik Indonesia. Krisis moneter itu dipandang tidak hanya berdimensi ekonomi, yaitu menurunnya nilai mata uang rupiah terhadap nilai mata asing, khususnya dolar Amerika Serikat. Krisis moneter sesungguhnya juga sarat dengan dimensi politik yaitu hilang kepercayaan masyarakat (nasional dan internasional) terhadap keseriusan regim dalam mengatasi tantangan ekonomi yang dihadapinya, yaitu menertibkan *rent seeking*, seperti: pemberian lisensi, monopoli atau-pun proteksi ekonomi lainnya, yang dapat berkembang menjadi sumber korupsi. Krisis ekonomi 1997 itu bukanlah krisis ekonomi yang pertama dialami oleh regim Orde Baru. Pada pertengahan 1980-an, Indonesia-pun menghadapi krisis ekonomi sebagai dampak menurunnya harga-harga komoditi primer di pasar global. Indonesia sebagai negara yang menggantungkan ekonominya pada ekspor migas (minyak bumi dan gas) saat itu sangat terpuuk oleh perkembangan ekonomi global itu. Apalagi dikaitkan dengan beban pembayaran hutang luar negerinya, Indonesia menempuh restrukturisasi ekonomi yaitu mengalihkan kebijakan industrialisasi dari strategi substitusi impor menuju strategi orientasi ekspor. Serangkaian liberalisasi ekonomi (perdagangan, keuangan, dan investasi) ditempuh untuk mendukung strategi orientasi ekspor itu.

Serangkaian liberalisasi ekonomi telah mendorong integrasi ekonomi Indonesia ke dalam sistem regional yang lebih luas. Satu aspek yang menarik bahwa serangkaian liberalisasi ekonomi itu-pun telah mendorong proses internasionalisasi kapital di Indonesia. Perubahan ekonomi telah memungkinkan perusahaan-perusahaan besar yang berkembang pada awal 1980-an, yang awalnya dibesarkan melalui peran dan intervensi pemerintah, mulai menjalin jaringan internasional dengan kekuatan kapital global. Apa implikasi dari perusahaan-perusahaan besar yang mampu menjalin *international link* dengan perusahaan transnasional itu? Mereka mulai menyuarakan pentingnya reformasi pengelolaan ekonomi, dan tidak lagi terlalu mengandalkan

pada koneksi politik. Namun, tidak semua kalangan pengusaha berhasil menjalin jaringan bisnis dengan kekuatan global. Mereka yang tidak berhasil menjalin jaringan bisnis dengan kekuatan global itu berkepentingan agar pemerintah tetap mempertahankan proteksi ekonomi. Reformasi ekonomi atau liberalisasi ekonomi dipandang merupakan ancaman yang membahayakan kepentingan mereka. Demikian pula, kalangan birokrasi pemerintahan-pun tidak sepenuh hati mendukung implementasi kebijakan liberalisasi ekonomi yang dikawatirkan akan membahayakan kepentingan mereka pula.

Ironisnya, perubahan ekonomi Indonesia tidak diikuti oleh perubahan politik yang berarti, termasuk dalam transparansi pengelolaan ekonomi. Pengelolaan berbagai kepentingan ekonomi tetap dikendalikan melalui sistem korporatisme. Demikian pula, koneksi politik yang dibersifat patron-klien (patrimonialisme) tetap menjadi ciri utama yang mewarnai relasi antara penguasa dan pengusaha. Dalam ekonomi Indonesia yang telah berubah itu, berbagai bentuk proteksi ekonomi sebagai instrumen yang semula dimaksudkan untuk melindungi industri yang baru berkembang-pun kian dipertanyakan. Bahkan, tidak menutup kemungkinan berbagai bentuk proteksi ekonomi dengan dalih untuk melindungi industri yang baru berkembang itu menjadi ladang subur bagi penyalah-gunaan kekuasaan. Bahkan, serangkaian kebijakan liberalisasi ekonomi, termasuk privatisasi yaitu pengalihan kepemilikan dan pengelolaan kegiatan dari pemerintah kepada swasta, yang ditempuh dalam struktur kekuasaan yang otoriter hanya menjadi arena pengalihan rente semata. Patrimonialisme, korporatisme negara dan proteksi ekonomi justru semakin melembaga dalam ekonomi Indonesia yang telah berubah itu, dan praktek-praktek itu menjelma dalam fenomena yang kemudian dikenal dengan sebutan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

Liberalisasi politik yang berlangsung sejak 1998 telah mendorong tuntutan reformasi dalam pengelolaan ekonomi. Sasaran utama dari reformasi ekonomi itu adalah membongkar praktek-praktek monopoli dan oligopoli yang sesungguhnya menjadi penyebab ekonomi biaya tinggi. Menguatnya praktek-praktek monopoli serta oligopoli yang berlindung di balik sentimen nasionalisme ekonomi untuk melindungi ekonomi nasional telah menenggelamkan Indonesia dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang semakin kompetitif. Praktek-praktek monopoli dalam pengelolaan ekonomi nasional hanya menguntungkan segelintir orang, yaitu kroni-kroni kekuasaan, dan menjadi beban yang ditanggung oleh masyarakat luas. Praktek-praktek monopoli dan oligopoli dalam pengelolaan ekonomi semakin memperparah ketimpangan dalam distribusi pendapatan serta kemiskinan. Praktek-praktek monopoli itu hanya menciptakan pembangunan ekonomi yang tidak berkeadilan. Sekali-pun, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu tidak membawa kemakmuran

bagi masyarakat luas. Runyamnya persoalan kemiskinan yang dialami Indonesia merupakan dampak dari pengelolaan ekonomi yang tidak berkeadilan itu. Bahkan, pengelolaan ekonomi yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi semakin mematikan potensi kalangan pengusaha kecil yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan ekonomi.

Di samping faktor internal yaitu tekanan politik untuk mendorong pengelolaan ekonomi yang berkeadilan, faktor eksternal yaitu perubahan ekonomi-politik global juga mempengaruhi perkembangan ekonomi Indonesia. Perubahan ekonomi-politik global sejak berakhirnya Perang Dingin semakin dicirikan meningkatnya ketergantungan antar negara. Perubahan ekonomi-politik global juga ditandai oleh fenomena meningkatnya regionalisme ekonomi. Bahkan, kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi yang memicu globalisasi ekonomi telah mendorong integrasi ekonomi banyak negara Dunia Ketiga ke dalam sistem ekonomi global. Bagaimana respon Indonesia dalam menghadapi perubahan ekonomi-politik global itu? Dalam menanggapi perubahan ekonomi global itu, Indonesia bersama dengan negara-negara ASEAN secara kolektif aktif terlibat dalam pembentukan berbagai forum kerjasama ekonomi regional, seperti: APEC (*Asia Pacific Economic Cooperation*) atau-pun ASEM (*ASEAN-European Meeting*). Bahkan pembentukan AFTA (*ASEAN Free Trade Area*), gagasan kolektif negara-negara ASEAN telah membawa implikasi yang luas bagi Indonesia dalam pengelolaan ekonomi nasionalnya. Kawasan bebas perdagangan ASEAN itu dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing ekonomi kawasan dalam merespon tantangan perubahan ekonomi global. Peningkatan daya saing kawasan Asia Tenggara itu ditempuh dengan menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai basis produksi global serta kekuatan pasar dengan penduduknya yang mencapai 525 juta. Dengan demikian, AFTA tidak hanya sekedar dimaksudkan mendorong peningkatan perdagangan antar negara anggota ASEAN, tetapi juga dimaksudkan untuk menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai daya tarik bagi kekuatan ekonomi global.

Tantangan ekonomi yang dihadapi Indonesia sejak pergantian kekuasaan yang berlangsung pada masa Pemerintahan B.J Habibie, Pemerintahan Wahid, Pemerintahan Megawati hingga Pemerintahan Sby saat ini adalah bagaimana meningkatkan daya saing ekonomi nasional serta mewujudkan pengelolaan ekonomi yang berkeadilan dalam lingkungan ekonominya yang telah berubah itu.

Pemberdayaan bagi Usaha Kecil

Krisis moneter yang memicu krisis ekonomi 1997 menunjukkan betapa rentan Indonesia menghadapi perubahan ekonomi global. Krisis moneter itu mengakibatkan sejumlah perusahaan skala besar menghadapi kesulitan finansial karena beban hutang mereka. Perusahaan-perusahaan

besar yang awalnya diharapkan sebagai ujung tombak dalam menghadapi ekonomi global itu justru menjadi batu sandungan bagi ketahanan ekonomi nasional. Sejumlah perusahaan besar yang hanya mengandalkan proteksi dan koneksi tak akan mampu menghadapi perubahan ekonomi itu. Bahkan, banyak diantara mereka yang akhirnya gulung tikar. Krisis ekonomi membawa dampak sosial yang luas bagi masyarakat, yaitu meningkatnya jumlah pengangguran dan kemiskinan. Pada 1999 jumlah kemiskinan di Indonesia mencapai 47,97 juta. Meluasnya kemiskinan di tengah perubahan politik yang tak menentu saat itu sangat rentan terhadap gejolak sosial. Sejumlah program untuk menanggulangi meluasnya kemiskinan-pun diperkenalkan, seperti: program Bantuan Tunai Langsung (BTL), program penyaluran beras bagi rakyat miskin yang dikenal dengan istilah program Raskin, hingga program pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin. Pemerintah juga mengalokasikan anggaran (APBN) yang besar untuk membiayai program-program yang bersifat padat karya. Program-program itu umumnya bersifat jangka pendek, yaitu dimaksudkan untuk mencegah atau menghindari meluasnya gejolak sosial. Program-program kemiskinan itu lebih bersifat sebagai jaringan pengaman sosial (*social safety net*).

Pencanangan program-program penyaluran kebutuhan pokok bagi keluarga miskin, ataupun program-program yang bersifat distributif tidak berarti bahwa program-program tersebut tidak bermanfaat. Program-program distribusi sebagai jaringan pengawan sosial itu tetap diperlukan, terlebih dalam ekonomi yang sulit. Namun, kelangsungan (*sustainability*) program-program semacam itu dihadapkan pada sejumlah tantangan. Pertama, program distributif sangat tergantung pada kemampuan finansial negara. Apalagi bila negara itu dihadapkan pada beban anggaran lainnya, seperti: pembayaran hutang luar negeri, maka kemampuan pemerintah untuk memobilisasi pendanaan dapat menjadi kendala serius bagi pembiayaan pada program-program distributif. Program distributif memerlukan dukungan birokrasi yang bersih. Tanpa didukung oleh tata kelola pemerintahan yang transparan (*good governance*), maka implementasi program-program distributif rawan terhadap kebocoran dan penyalah-gunaan.

Kemiskinan merupakan masalah yang bersifat multi-dimensi. Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan atau program-program yang inovatif dan kreatif dalam mengatasi kemiskinan. Pemberdayaan usaha kecil merupakan isu yang strategis dalam melengkapi berbagai kebijakan dan program yang selama ini telah dikembangkan dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia. Mengapa pemberdayaan usaha kecil itu menjadi kebijakan atau program yang strategis? Pertama, usaha kecil ternyata relatif mampu bertahan dalam menghadapi goncangan ekonomi global. Kedua, usaha kecil merupakan jenis kegiatan usaha yang paling banyak berkembang di Indonesia, yaitu diperkirakan mencapai 90 persen dari seluruh kegiatan usaha. Ketiga, usaha kecil menyerap

tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Usaha kecil menyerap 82 persen angkatan kerja, yaitu sebesar 73 juta pekerja. Ke-empat, usaha kecil menyumbang 58 persen terhadap GDP. Banyak kalangan melihat bahwa usaha kecil sesungguhnya merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia (Nazara dan Gitaharie, 2008;).

Pemberdayaan usaha kecil memang bukan isu baru dalam memerangi ketimpangan sosial dan kemiskinan. Namun, ada sesuatu yang baru dari pendekatan ini yaitu bagaimana mendorong kreativitas dalam mewujudkan program tersebut di tengah tantangan perubahan ekonomi dan politik yang dihadapi Indonesia dewasa ini. Pemberdayaan usaha kecil juga membutuhkan dukungan program-program yang selama ini telah dikembangkan dalam mengatasi kemiskinan. Pemberdayaan usaha kecil tidak berarti mengabaikan atau meniadakan program-program lainnya. Salah satu momentum yang membuka peluang bagi pemberdayaan usaha kecil adalah perubahan politik sejak 1998 yang mendorong proses demokratisasi di Indonesia. Demikian pula, restrukturisasi sistem pemerintahan yang sentralistik menuju sistem pemerintahan yang desentralistik –membuka peluang bagi berbagai upaya pemberdayaan usaha kecil di daerah.

Salah satu aspek yang penting dari perubahan politik bagi pemberdayaan usaha kecil yaitu akses bagi usaha kecil dalam mengartikulasikan kepentingan mereka. Sehubungan dengan itu, keberadaan asosiasi-asosiasi usaha kecil menjadi sarana yang penting dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan mereka. Sejak perubahan politik 1998, terdapat 60 asosiasi usaha bisnis independen yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, dan Asia Foundation memberikan dukungan yang berarti dalam pembentukan asosiasi-asosiasi usaha di daerah. Perkembangan tumbuhnya organisasi usaha di Indonesia merupakan aspek kelembagaan yang diperlukan dalam memperkuat demokrasi. Kehadiran asosiasi usaha di daerah sangat penting seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah. Asosiasi usaha kecil di daerah menjadi media komunikasi bagi kalangan usaha dengan pemerintahan di daerah dalam menyelesaikan isu-isu ekonomi. Asosiasi usaha juga dapat menjadi kekuatan kolektif dalam mengatasi praktek-praktek pengelolaan ekonomi yang tidak adil, seperti: monopoli kegiatan usaha, pungutan-pungutan yang memberatkan bagi kegiatan usaha, hingga pengelolaan perizinan yang kurang transparan. Sejumlah konferensi nasional yang diselenggarakan asosiasi usaha dari berbagai daerah telah menjadi arena yang penting dalam memfasilitas informasi pasar dan teknologi, hingga berbagi pengalaman dalam berorganisasi. Kehadiran asosiasi bisnis di daerah yang bersifat mandiri ini sangat penting dalam mencegah praktek-praktek bisnis yang tidak sehat. Mewujudkan asosiasi bisnis yang mandiri tentu merupakan isu yang paling menentukan. Asosiasi bisnis yang mandiri umumnya bersifat terbuka dan tidak diskriminatif, serta tidak menggantungkan kegiatannya dari bantuan keuangan pemerintah. Asosiasi-asosiasi bisnis yang hanya mengandalkan kegiatannya

pada proyek-proyek APBD, yaitu melalui proses tender yang tidak transparan sudah dapat dipastikan bahwa kehadiran mereka tidak akan banyak membawa manfaat dalam mendorong perubahan ekonomi daerah, yaitu memperluas lapangan kerja serta memperkuat ekonomi.

Perizinan usaha merupakan aspek yang penting bagi perkembangan kegiatan usaha, termasuk bagi kegiatan usaha kecil. Banyak kegiatan usaha kecil yang tidak memiliki izin usaha hanya karena mereka harus menghadapi proses birokrasi perizinan yang panjang dan berbelit-belit yang menyebabkan mahal biaya untuk memperoleh izin usaha itu. Akibatnya, banyak kegiatan usaha kecil yang tidak dilindungi oleh hukum, dan karenanya kegiatan mereka sangat rentan terhadap berbagai regulasi pemerintah. Bahkan, tanpa adanya perlindungan hukum merupakan faktor yang menghambat kemajuan usaha. Mereka dapat mengalami kesulitan untuk memperoleh fasilitas kredit per-bank atau fasilitas-fasilitas layanan lainnya. Pemerintah telah menempuh reformasi birokrasi berizinan sebagai bagian penting bagi pemberdayaan usaha kecil. Reformasi perizinan itu pada hakekatnya dimaksudkan untuk menyederhanakan prosedur pengurusan izin serta mendorong transparansi dalam proses pengurusan izin. Penyederhanaan proses perizinan dimaksudkan untuk memperpendek mata rantai birokrasi serta menghindari duplikasi persyaratan administratif. Sedangkan, transparansi dalam proses perizinan dimaksudkan memberikan jaminan kepastian, baik dari aspek biaya dan waktu yang diperlukan bagi penyelesaian suatu izin usaha. Pelembagaan pelayanan satu pintu (*one stop service*) dalam proses perizinan kegiatan usaha yang dilembagakan di seluruh pemerintahan kabupaten / kota diharapkan dapat mendorong partisipasi kegiatan usaha kecil dalam perekonomian di daerah.

Pemberdayaan usaha kecil pada akhirnya diharapkan dapat memberikan ruang bagi tumbuhan kreativitas kegiatan usaha masyarakat luas. Pemberdayaan usaha kecil di tengah tantangan meningkatkan daya saing ekonomi (daerah dan nasional) tidak berarti mengabaikan peran pemerintah dalam ekonomi. Peran pemerintah dalam pemberdayaan usaha kecil akan sangat ditentukan oleh kualitas intervensi pemerintah dalam mendorong kegiatan ekonomi yang sehat. Pemberdayaan usaha kecil sebagai bagian dari upaya menggerakkan kekuatan ekonomi dan memperluas lapangan kerja juga menuntut dukungan sosial-budaya, seperti: penyetaraan gender, serta kepedulian sosial. Penyetaraan gender dan kepedulian sosial merupakan aspek penting dalam demokrasi. Pada akhirnya pemberdayaan usaha kecil sebagai strategi untuk mengatasi kemiskinan juga sangat memerlukan dukungan masyarakat yang luas.

Peluang dan Tantangan

Pemberdayaan usaha kecil merupakan program strategis untuk dikembangkan di tengah tantangan Indonesia dalam mengatasi kemiskinan. Kegiatan usaha kecil merupakan salah

kekuatan ekonomi yang berpotensi untuk menggerakkan kemajuan ekonomi nasional, dan karenanya berperan penting dalam memperluas kesempatan kerja serta mengurangi jumlah kemiskinan. Pemberdayaan usaha kecil memerlukan sinergi untuk memadukan program-program pengentasan kemiskinan lainnya. Pemberdayaan usaha kecil tidak berarti mengabaikan program-program lainnya yang dimaksudkan untuk menanggulangi kemiskinan. Pemberdayaan usaha kecil memperoleh momentum yang penting dalam mengatasi persoalan kemiskinan seiring dengan perubahan politik sejak 1998.

Kebijakan desentralisasi yang diperkenalkan awal 2000-an merupakan peluang sekaligus tantangan bagi pemberdayaan usaha kecil. Kebijakan desentralisasi sebagai instrumen pendalaman demokratisasi itu memberikan peluang yang besar bagi daerah dalam memacu kemajuan ekonomi, termasuk kegiatan usaha kecil. Otonomi daerah yang didukung oleh penguatan demokrasi serta transparansi pengelolaan ekonomi merupakan peluang bagi berkembangnya usaha kecil yang menjadi kekuatan ekonomi daerah. Otonomi daerah yang didukung oleh penguatan demokrasi itu membuka peluang bagi keterlibatan masyarakat luas dalam proses pembangunan daerah, termasuk tumbuhnya berbagai organisasi serta asosiasi usaha yang indenpden. Penguatan demokrasi sangat diperlukan dalam mendukung transparansi kebijakan dan pengelolaan ekonomi. Pelembagaan transpransi pengelolaan ekonomi merupakan kondisi yang diperlukan dalam pemberdayaan usaha kecil. Penting untuk dicatat bahwa lemahnya transparansi pengelolaan ekonomi inilah yang mengakibatkan usaha kecil di masa regim otoritarian mengalami proses marginalisasi ekonomi. Sebaliknya, otonomi daerah yang gagal dalam melembagakan transparansi pengelolaan ekonomi hanya akan menempatkan usaha kecil sebagai 'sapi perahan' bagi kemakmuran elit kekuasaan lokal. Otonomi daerah hanya diarahkan untuk memacu pendapatan asli daerah (PAD) dengan mengabaikan pengembangan potensi usaha kecil sebagai tulang punggung kemajuan ekonomi.

Referensi Bacaan

Asia Foundation, *Unleashing Small Business Growth: The Asia Foundation Experience in Indonesia*. Tersedia pada www.asiafoundation.org. Diakses 20 Juni 2012.

Nazara, Sauhasil dan Beta Yulianita Gitaharie, "Poverty Reduction through Developing Micro, Small and Medium Enterprises", *Working Paper No. 1*, Jakarta: Hickling, 2008.